

# Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru

## Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2013



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Panglima Batur Barat No.2  
Banjarbaru 70711

## Kata Pengantar

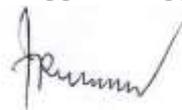
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banjarbaru, 24 Januari 2014  
Kuasa Pengguna Anggaran,



**FATMIR EDWAR**  
**NIP 19650601 199203 1 003**

## Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	2
Ringkasan Laporan Keuangan	5
Pernyataan Tanggung Jawab	7
<b>I. Laporan Realisasi Anggaran</b>	<b>9</b>

<b>II. Neraca</b>	10
<b>III. Catatan atas Laporan Keuangan</b>	12
A. Penjelasan Umum	12
A.1. Dasar Hukum	12
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis	12
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	16
A.4. Kebijakan Akuntansi	16
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	21
B.2. Belanja Negara	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
C.1. Aset Lancar	26
C.2. Aset Tetap	32
C.3. Piutang Jangka Panjang	37
C.4. Aset Lainnya	39
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	40
C.6. Ekuitas Dana Lancar	41
C.7. Ekuitas Dana investasi	42
D. Pengungkapan Penting Lainnya	42
D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	42
D.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	42
D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	42
D.4. Rekening Pemerintah	42
D.5. Pengungkapan Lain-lain	42
<b>Laporan-laporan Pendukung sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013</b>	44
• LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan	46
• LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja	47
• Neraca Percobaan	48
<b>Laporan Barang Pengguna</b>	49
• Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2013 (intra, ekstra, gabungan) per kelompok	50

*Laporan Keuangan Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta I Tahun 2013*

- Laporan Barang Persediaan dan BA Stock Opname Fisik 51
- Berita Acara Rekonsiliasi KPKNL 52

**Lampiran Lainnya Pendukung CALK** 53

- Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual 54
- LPJ Bendahara dan Rekening Koran 55
- Kartu Penyusunan Piutang Tidak Tertagih 56
- Berita Acara Rekonsiliasi KPPN 57

	Halaman
Tabel 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012	2
Tabel 2. Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2013 dan 2012	5
Tabel 3. Penggolongan Kualitas Piutang	7
Tabel 4. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	9
Tabel 5. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	10
Tabel 6. Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2013 dan 2012	12
Tabel 7. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013	12
Tabel 8. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan 2012	12
Tabel 9. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012	12
Tabel 10. Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012	16
Tabel 11. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan 2012	16
Tabel 12. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012	21
Tabel 13. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	21
Tabel 14. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	22
Tabel 15. Rincian Belanja Dibayar di Muka	26
Tabel 16. Rincian Piutang Bukan Pajak	26
Tabel 17. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	32
Tabel 18. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	37
Tabel 19. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	39
Tabel 20. Rincian Persediaan	40
Tabel 21. Rincian Aset Tetap	41
Tabel 22. Rincian Saldo Tanah	42
Tabel 23. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	42
Tabel 24. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	42
Tabel 25. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan	42

*Laporan Keuangan Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta I Tahun 2013*  
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tabel 26.	Rincian Aset Lainnya	42
Tabel 27.	Rincian Aset Tak Berwujud	42
Tabel 28.	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	42
Tabel 29.	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	44
Tabel 30.	Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan	46
Tabel 31.	Rincian Pendapatan Diterima di Muka	47
Tabel 32.	Rincian Ekuitas Dana Lancar	48
Lampiran A1	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset  Tetap	49
Lampiran A2	Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual	50

## 1. RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

### Laporan Keuangan Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta I Tahun 2013

Laporan Keuangan Kantor Pembinaan Akuntansi Jakarta I Tahun 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

#### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2013 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp2.644.532.398,00** atau mencapai **105,78** persen dari estimasi pendapatannya sebesar **Rp2.500.000.000,00**.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah sebesar **Rp9.497.730.063,00** atau mencapai

**90,72** persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp10.469.684.000,00**.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan TA 2012 (dalam Rupiah)**

Realisasi Anggaran	TA 2013			TA 2012
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Terhadap Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	2,500,000,000	2,644,532,398	105.78%	2,538,279,250
Belanja Negara	10,469,684,000	9,497,730,063	90.72%	8,733,487,433

#### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2013 dan 2012.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2013 dicatat dan disajikan sebesar **Rp14.372.530.342,00** yang terdiri dari: Aset Lancar

*Laporan Keuangan Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta I Tahun 2013*

sebesar Rp183.336.585,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp14.189.193.757,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar **Rp0,00**.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar **Rp14.372.530.342,00** yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp183.336.585,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp14.189.193.757,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 (dalam Rupiah)**

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ (penurunan)	
			Rp	%
<b>Aset</b>	<b>14,372,530,342</b>	<b>23,958,413,460</b>	<b>(9,585,883,118)</b>	<b>-40.01%</b>
Aset Lancar	183,336,585	107,870,135	75,466,450	69.96%
Aset Tetap	14,189,193,757	23,850,543,325	(9,661,349,568)	-40.51%
Piutang Jangka Panjang	-	-	-	0.00%
Aset Lainnya	-	-	-	0.00%
<b>Kewajiban</b>	<b>-</b>	<b>210,000</b>	<b>(210,000)</b>	<b>0.00%</b>
Kewajiban Jangka Pendek	-	210,000	(210,000)	-100.00%
<b>Ekuitas Dana</b>	<b>14,372,530,342</b>	<b>23,958,203,460</b>	<b>(9,585,673,118)</b>	<b>-40.01%</b>
Ekuitas Dana Lancar	183,336,585	107,660,135	75,676,450	70.29%
Ekuitas Dana Investasi	14,189,193,757	23,850,543,325	(9,661,349,568)	-40.51%
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>14,372,530,342</b>	<b>23,958,413,460</b>	<b>(9,585,883,118)</b>	<b>-40.01%</b>

### 3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening

kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2013, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana

*Laporan Keuangan Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta I Tahun 2013*

diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

## **BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI BANJARBARU**

*Jl. PANGLIMA BATUR BARAT NO 2 BANJARBARU TELEPON 0511 4774861, 4772461 , FAXIMILE 0511 4772115*

---

### **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

*Laporan Keuangan Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta I Tahun 2013*

Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banjarbaru, 24 Januari 2014  
Kuasa Pengguna Anggaran,



**FATMIR EDWAR**

NIP 19650601 199203 1 003



I  
LAPORAN REALISASI  
ANGGARAN

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

## KANTOR PEMBINAAN AKUNTANSI INSTANSI JAKARTA I LAPORAN REALISASI ANGGARAN

## UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2013		% thd Anng	TA 2012
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1.				
Jum Pendpt Negara & Hibah		344,704,275,000	344,760,037,633	100.02	331,034,989,628
B. Belanja Negara	B.2.				
1. Belanja Pegawai	B.2.1.				
	B.2.2.	51,451,802,000	50,090,765,929	97.35	50,037,587,605
	B.2.3.	51,317,761,000	48,870,914,362	95.18	49,563,282,770
Jumlah Belanja Negara		399,594,625,000	388,773,839,555	97.29	276,806,868,329



**II. NERACA**

**KANTOR PEMBINAAN AKUNTANSI INSTANSI JAKARTA I NERACA**

**PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

( dalam Rp )

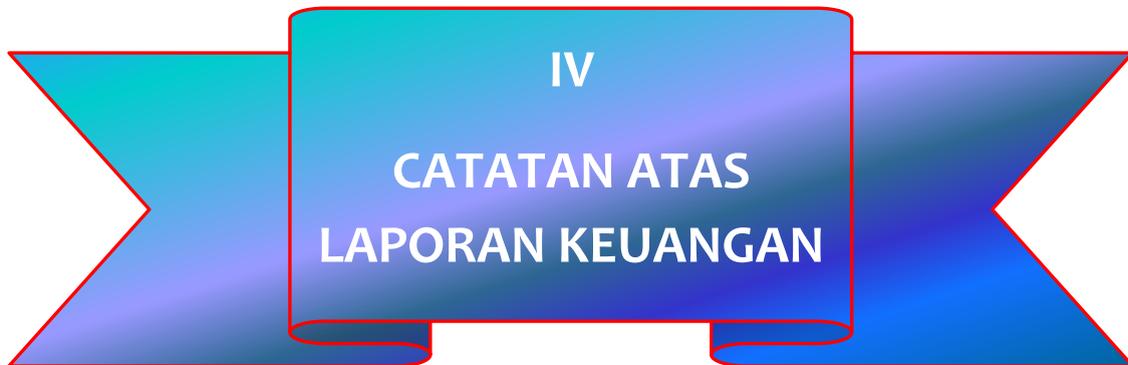
Uraian	Catatan	31 Desember 2013	31 Desember 2012
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	C.1		
		73,081,697	0
Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di	C.1.1		
Bendahara Penerimaan Kas Lainnya		49,511,586	58,450,532
dan Setara Kas Belanja Dibayar di	C.1.2		
Muka (prepaid) Piutang Bukan Pajak		47,907,875	13,375,850
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.3		
		3,630,498,000	322,823,600
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>3,929.254.418</b>	<b>560.527.757</b>
<b>ASET TETAP</b>	C.2		
Tanah	C.2.1	1,059,000,000	1,059,000,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	659,560,799,089	570,594,195,200
Gedung dan Bangunan Jalan			
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>1.781.245.876.244</b>	<b>1.490.113.739.191</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>	C.3		
		32,400,000	43,200,000
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		<b>32.238.000</b>	<b>42,984,000</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	238,600,000	101,030,000
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>352.135.999</b>	<b>276.350.838</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1.785.559.504.661</b>	<b>1.490.993.601.786</b>

Laporan Keuangan Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta I Tahun 2013

<b>KEWAJIBAN</b>	C.5	218.615.000	908.017.500
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b> Utang kepada Pihak Ketiga Uang Muka			

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

U	Catatan	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		611.275.283	1.170.228.0
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>611.275.283</b>	<b>1.170.228.0</b>
<b>EKUITAS DANA</b>			
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b> Cadangan Piutang Cadangan	C.6		
Persediaan		116,488,360	81,589,275
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek	C.6.1		
Ekuitas Dana Lancar Lainnya		11.766.900	
<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>		<b>3.317.979.135</b>	<b>(609.700.2)</b>
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>	C.7		
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.7.1	1.781.245.876.244	1.490.113.739.1
<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>		<b>1.781.630.250.243</b>	<b>1.490.433.074.0</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>1.784.948.229.378</b>	<b>1.489.823.373.7</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>1.785.559.504.661</b>	<b>1.490.993.601.7</b>



**IV**  
**CATATAN ATAS**  
**LAPORAN KEUANGAN**

**IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

## A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

### A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

### A.2. KEBIJAKAN TEKNIS Kantor Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru

#### 1) Latar Belakang

Abad 21 menghadapi lingkungan strategis nasional dan internasional yang berbeda dengan tantangan strategis yang dihadapi pada Abad 20. Di akhir Abad 20 dan dalam dekade-dekade awal Abad 21, Indonesia menghadapi tantangan-tantangan berat di segala bidang; krisis multi dimensi, ancaman desintegrasi, dan keterpurukan ekonomi. Indikator-indikator pembangunan menunjukkan bahwa posisi Indonesia berada dalam kelompok terendah dalam peta kemajuan pembangunan bangsa-bangsa, baik dilihat dari indeks pembangunan manusia, ketahanan ekonomi, struktur industri, perkembangan pertanian, sistem hukum dan peradilan, penyelenggaraan *clean government*, dan penyelenggaraan *good governance* baik pada sektor publik mau pun bisnis

RENSTRA

Dalam rangka mewujudkan visi sebagai negara maju dan sejahtera pada tahun 2025, Indonesia bertekad mempercepat transformasi ekonomi. Untuk itu, disusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia (MP3EI), berdasarkan Perpres No. 32 Tahun 2011. Percepatan dan transformasi ekonomi Indonesia membutuhkan perubahan pola pikir (*mindset*), perubahan pola pikir paling mendasar adalah pemahaman bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan Swasta. Percepatan & perluasan pembangunan ekonomi Indonesia dijalankan berdasarkan program prioritas, yang merupakan hasil dari sejumlah kesepakatan yang dibangun bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan kesepakatan tersebut, fokus dari pengembangan MP3EI ini diletakkan pada **8 Program Utama**, yaitu 1). Pertanian, 2). Pertambangan, 3). Energi, 4). Industri, 5). Kelautan, 6). Pariwisata, 7). Telematika, serta 8). Pengembangan Kawasan Strategis.

Peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui koridor ekonomi di dalam Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah dengan pengembangan kegiatan ekonomi utama di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi disertai penguatan konektivitas antar pusat-pusat ekonomi dan lokasi kegiatan ekonomi utama serta fasilitas pendukungnya. Pembangunan koridor ekonomi ini juga dapat diartikan sebagai pengembangan wilayah untuk menciptakan dan memberdayakan basis ekonomi terpadu dan kompetitif serta berkelanjutan.

Pembangunan koridor ekonomi di Indonesia dilakukan berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada masing-masing koridor ekonomi akan difokuskan pada pengembangan sejumlah kegiatan ekonomi utama sesuai dengan keunggulan masing-masing wilayahnya. Dalam rangka Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI), telah diidentifikasi beberapa kegiatan ekonomi utama yang berpotensi menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi Koridor Ekonomi Kalimantan di masa depan adalah dengan tema : “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional”, yaitu: minyak dan gas, batu bara, kelapa sawit, besi baja, bauksit, dan perikanan.

Kebijakan Pembangunan Industri Nasional yang sangat membutuhkan dukungan keterkaitan, memerlukan perencanaan yang dapat menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar fungsi Pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengembangan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya manusia secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk itu diperlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dari rangkaian tersebut perencanaan merupakan suatu hal yang signifikan bagi keberhasilan organisasi. Sebagai upaya meraih perencanaan yang matang, maka diharapkan pola penyusunan rencana strategis ini dapat memberikan hasil yang diharapkan.

Perencanaan pengembangan Balai Riset dan Standardisasi Industri

Banjarbaru Kalimantan Selatan kedepan, adalah memperjelas prioritas organisasi dan pencapaian target dalam pemenuhan tugas pokok Balai Riset dan Standardisasi. Rencana Strategis Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru disusun sebagai suatu siklus berkelanjutan, yang akan mendasari kegiatan organisasi sehari-hari, dan akan menjadi sarana komunikasi antara organisasi dengan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Untuk menyiapkan kegiatan dimaksud, maka Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru perlu membangun budaya organisasi, agar dapat melahirkan SDM profesional, peralatan memadai dan menjalin hubungan lebih luas lagi. Kesemua hal tersebut tentu tetap mengacu pada garis kebijaksanaan serta arahan Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri.

Dalam mewujudkan visi tersebut Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru menyusun Rencana Strategis yang isinya menguraikan strategi yang akan diambil dalam rangka mencapai tujuan dan menjabarkan strategi tersebut kedalam program rencana kerja, serta indikator kinerja untuk kurun waktu tahun 2010 – 2014. Rencana Strategis memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

## **2) Maksud dan Tujuan**

Rencana strategis Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru tahun 2010 – 2014 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan tolok ukur kinerja kegiatan Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Stratejik Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan dasar acuan kebijakan program Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru.
2. Memberikan pedoman pelaksanaan program kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru
3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru pada 2010 – 2014
4. Memberikan informasi dan kesempatan kepada IKM agar memanfaatkan teknologi dan hasil litbang Balai Riset dan Standardisasi secara maksimal

## **3) Tupoksi**

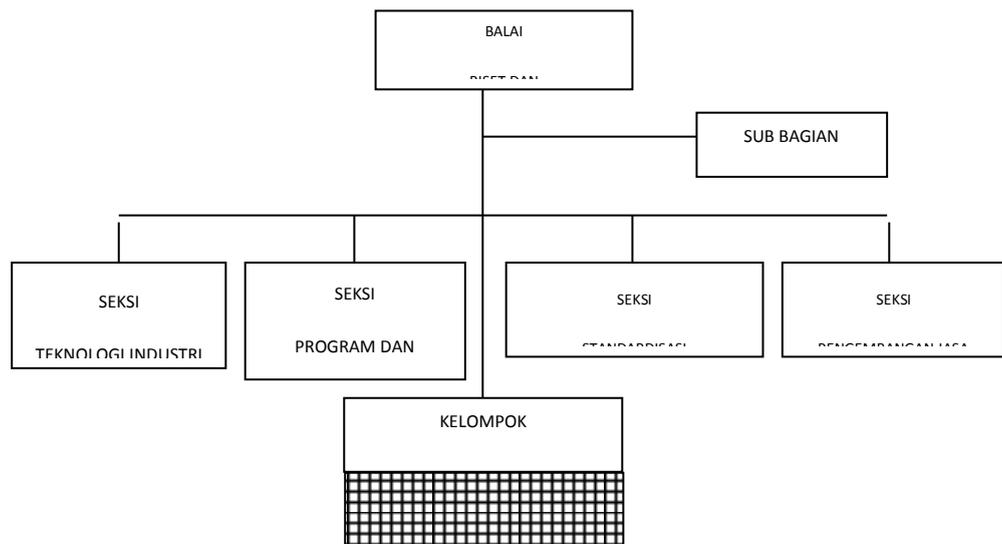
Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian R.I. Nomor : 49M-IND/PER/6/2006, Tanggal 29 Juni 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri. Balai Riset dan Standardisasi Industri

Banjarbaru merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan Pengkajian Kebijakan , Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI), sesuai dengan surat keputusan tersebut diatas mempunyai tugas pokok **“melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi di bidang industri”**.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri ;
- b. Penyusunan program dan pengembangan kompetensi di bidang jasa riset/litbang ;
- c. Perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin dan hasil produk;
- d. Pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil riset/ penelitian dan pengembangan; dan
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Balai Riset dan Standardisasi Industri, serta pengelolaan perpustakaan.

Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru merupakan salah satu lembaga pemerintah di bawah Badan Pengkajian Kebijakan , Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian sesuai peraturan Menteri Perindustrian R.I. No.49/M-IND/PER/6/2006, tanggal 29 Juni 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri. Struktur organisasi Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru adalah sebagai berikut :



#### 4) Visi dan Misi

Kenyataan yang terjadi pada saat ini adalah terjadinya dinamika masyarakat yang berdampak pada terjadinya perubahan-perubahan, dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam sektor industri. Perubahan-perubahan ini memerlukan sikap arif dalam menghadapinya, sehingga memberikan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri khususnya di Kalimantan Selatan sebagai daerah dimana Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru berdomisili. Untuk itu diperlukan kajian yang cermat terhadap berbagai kemungkinan yang berpengaruh bagi organisasi baik pengaruh internal maupun eksternal.

Dalam menghadapi dinamika perubahan ini Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru harus mampu menciptakan nilai yang ada manfaatnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan produk yang dihasilkan oleh Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru. Jika Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru tidak mampu mengantisipasi kondisi yang berkembang dan berubah setiap saat, maka eksistensi organisasi tidak memiliki arti lagi.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Atas dasar pemikiran dengan berbagai pertimbangan dan mengakomodasikan keperluan stakeholders, maka Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru menetapkan visi sebagai berikut:

**”Menjadi pusat riset dan layanan jasa yang unggul dan terpercaya dalam mendukung dan mengembangkan industri pengolahan sumber daya alam hutan dan potensi lainnya ”.**

Terwujudnya visi tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak yang tersirat pada visi akan lebih nyata dengan jelas pada misi. Lebih jauh pernyataan misi Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru lebih menunjukkan kebutuhan dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

Misi Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru ditetapkan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan dan standardisasi di bidang teknologi industri, yang terfokus pada pengolahan sumber daya alam hutan antara lain kayu, rotan, dan bambu serta potensi lainnya
2. Melakukan inovasi dan penguasaan teknologi di bidang kayu, rotan dan bambu serta potensi lainnya yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu, nilai tambah dan daya saing IKM.
3. Memberikan jasa pelayanan yang berkualitas di bidang pengujian, konsultasi teknologi produk/proses, pelatihan teknis operasional, standardisasi, sertifikasi, penanggulangan pencemaran industri dan informasi teknologi.
4. Melakukan kemitraan dengan industri, lembaga litbang, perguruan tinggi dan lembaga lain.

Misi tersebut disusun dengan pertimbangan adanya kebutuhan ataupun tuntutan yang diinginkan dalam rangka pengembangan potensi daerah dalam sektor industri, melalui litbang dan jasa pelayanan teknik oleh Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru.

Untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan diperlukan komitmen yang kuat diantara anggota organisasi untuk saling mendukung satu sama lain didalamnya tentu terkandung nilai keterbukaan untuk maju bersama mencapai visi dan misi organisasi.

### **A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Tahun 2013 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

#### **A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi

Jakarta I adalah sebagai berikut:

## 1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

Kebijakan  
Akuntansi atas

Pendapatan

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## (2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

Kebijakan  
Akuntansi atas  
Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja

## (3) Kebijakan Akuntansi atas Aset

Kebijakan  
Akuntansi atas  
Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap,
- Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

### a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera

untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
  
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

## **b. Aset Tetap**

### *Aset Tetap*

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian

## **Piutang Jangka Panjang**

*Piutang Jangka Panjang*

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

**Aset Lainnya**

*Aset Lainnya*

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

**(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung

**(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana**

- Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan *kewajiban* pemerintah.
- Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.
- Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan *kewajiban* jangka pendek.
- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

### (6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Tabel 3

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

### (7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap

yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

## C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar

Rp183.336.585,00

### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp183.336.585,00 dan 107.870.135,00.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 12

Tabel 12

*Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012*

No	Aset Lancar	TA 2013	TA 2012
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
2	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-
4	Belanja Dibayar di Muka	-	-
5	Piutang Bukan Pajak	100,940,000	78,999,000
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(9,518,475)	(1,647,095)
7	Piutang Bukan Pajak (Netto)	91,421,525	77,351,905
8	Persediaan	91,915,060	30,518,230
	<b>Jumlah</b>	<b>183,336,585</b>	<b>107,870,135</b>

Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0,00

### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan Rp0. yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam Tabel 13.

Tabel 13  
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Jenis	TA 2013	TA 2012
1	BNI 1946 Cabang Banjarbaru	0	0
2	Uang Tunai	-	0
Jumlah		0	0

Saldo Kas di Bendahara pengeluaran TA 2013 tersebut keseluruhannya telah disetor ke rekening Kas Negara pada tanggal 27 Desember 2013 dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 1314110206040200 untuk Rupiah Murni dan 1112020314061305 untu PNB.

Kas di Bendahara Penerimaan  
Rp0,00

### C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar masing-masing Rp0,00. dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Nilai Kas di Bendahara Penerimaan pada Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru pada tanggal pelaporan adalah Rp 73,270,000,00 yang ada pada Bank BNI 1946 Cabang Banjarbaru dengan Nomor Rek. 0081309343 dan telah disetor ke rekening Kas Negara pada tanggal 31 Desember 2013 dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 0511000809040607.

Kas Lainnya dan Setara  
Kas Rp0,00

### C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp0,00. dan Rp0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Tidak terdapat rincian kas lainnya dan setara kas disajikan dalam Tabel 14.

Tabel 14  
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No	Jenis	T.A. 2013	T.A. 2012
1	Jasa Giro yang belum di setor ke kas negara	-	-
2	Pajak PPh yang Belum Disetor	-	-
3	Honor kegiatan yang belum dibagikan	-	-
4	Pengembalian Belanja belum disetor ke kas negara	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

#### C.1.4. Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. dan Rp0,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Tidak terdapat Rincian Belanja Dibayar di Muka seperti disajikan dalam Tabel 15.

Tabel 15  
Rincian Belanja Dibayar di Muka

No	Jenis	T.A. 2013	T.A. 2012
1	Pembayaran Internet	-	-
2	Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
3	Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

#### C.1.5. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar **Rp100.940.000,00** dan **Rp78.999.000,00**.. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan dalam Tabel 16. yang merupakan pengakuan PNBPN atas jasa layanan teknis pengujian sampel.

Tabel 16  
Rincian Piutang Bukan Pajak

No.	Debitur	Jumlah
1	KLH KAB. SUKAMARA	1,035,000
2	KLH KAB. SUKAMARA	9,360,000
3	PT. ARUTMIN INDONESIA NPLCT	470,000
4	PT. WANA SAWIT SUBUR LESTARI	1,945,000
5	PT. ARUTMIN INDONESIA NPLCT	460,000
6	PT. HASNUR FORESTRY	2,880,000
7	PT. HASNUR JAYA UTAMA	5,040,000
8	PT. AGROBUKIT	2,880,000
9	PT. AGROBUKIT	4,980,000
10	PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI	1,945,000
11	PT. AGROBUKIT	9,440,000
12	PT. KATINGAN INDAH UTAMA	510,000
13	BLH KAB. KOTABARU	3,000,000
14	PT. SUMBER CAHAYA REZEKI UTAMA	660,000
15	PT. ARUTMIN INDONESIA NPLCT	470,000
16	PT. KODECO AGROJAYA MANDIRI	840,000
17	PT. ASTRA AGRO LESTARI I	11,220,000
18	PT. ASTRA AGRO LESTARI I	10,920,000
19	PT. ASTRA AGRO LESTARI I	600,000
20	PT. KATINGAN INDAH UTAMA	1,170,000
21	PT. HASNUR RIUNG SINERGI	660,000
22	PT. LAGUNA MANDIRI	1,440,000
23	PT. BARITO PUTRA PLANTATION	1,440,000
24	PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA, JOBSITE MASS	270,000
25	PT. KATINGAN INDAH UTAMA	2,460,000
26	PT. KATINGAN INDAH UTAMA	2,850,000
27	PT. ANTANG GANDA UTAMA	780,000
28	PT. BORNEO INDOBARA	1,410,000
29	PT. ARUTMIN INDONESIA NPLCT	13,320,000
30	PT. PARIPURNA SWAKARSA	820,000
31	PT. LANGGENG MUARA MAKMUR	1,230,000
32	PT. INDOTRUBA TENGAH	410,000
33	PT. INDOTRUBA TENGAH	3,280,000
34	PT. LANGGENG MUARA MAKMUR	410,000
35	PT. SAJANG HEULANG	335,000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 100,940,000</b>

Mutasi piutang PNPB pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	78.999.000
Mutasi tambah: Piutang Bukan Pajak (Pengujian Sampel)	100,940,000
Mutasi kurang: Pelunasan tahun 2013	78.999.000
<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>100,940,000</b>

### C.1.6. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan piutang tak tertagih – piutang bukan pajak per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar **Rp(9.518.475,00)** dan **Rp(1.647.095,00)**  
Penyisihan piutang tak tertagih - piutang bukan pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing debitur. Rincian estimasi penyisihan sebagaimana tersaji pada Tabel 17.

Tabel 17  
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai Penyisihan
KLH KAB. SUKAMARA	Diragukan	1,035,000	50%	517,500
KLH KAB. SUKAMARA	Diragukan	9,360,000	50%	4,680,000
PT. ARUTMIN INDONESIA NPLCT	Diragukan	470,000	50%	235,000
PT. WANA SAWIT SUBUR LESTARI	Diragukan	1,945,000	50%	972,500
PT. ARUTMIN INDONESIA NPLCT	Kurang Lancar	460,000	10%	46,000
PT. HASNUR FORESTRY	Kurang Lancar	2,880,000	10%	288,000
PT. HASNUR JAYA UTAMA	Kurang Lancar	5,040,000	10%	504,000
PT. AGRO BUKIT	Kurang Lancar	2,880,000	10%	288,000
PT. AGRO BUKIT	Kurang Lancar	4,980,000	10%	498,000
PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI	Kurang Lancar	1,945,000	10%	194,500
PT. AGRO BUKIT	Kurang Lancar	9,440,000	10%	944,000
PT. KATINGAN INDAH UTAMA	Kurang Lancar	510,000	10%	51,000
BLH KAB. KOTABARU	Lancar	3,000,000	0.50%	15,000
PT. SUMBER CAHAYA REZEKI UTAMA	Lancar	660,000	0.50%	3,300
PT. ARUTMIN INDONESIA NPLCT	Lancar	470,000	0.50%	2,350
PT. KODECO AGROJAYA MANDIRI	Lancar	840,000	0.50%	4,200
PT. ASTRA AGRO LESTARI I	Lancar	11,220,000	0.50%	56,100
PT. ASTRA AGRO LESTARI I	Lancar	10,920,000	0.50%	54,600
PT. ASTRA AGRO LESTARI I	Lancar	600,000	0.50%	3,000
PT. KATINGAN INDAH UTAMA	Lancar	1,170,000	0.50%	5,850
PT. HASNUR RIUNG SINERGI	Lancar	660,000	0.50%	3,300
PT. LAGUNA MANDIRI	Lancar	1,440,000	0.50%	7,200
PT. BARITO PUTRA PLANTATION	Lancar	1,440,000	0.50%	7,200
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA, JOBSITE M	Lancar	270,000	0.50%	1,350
PT. KATINGAN INDAH UTAMA	Lancar	2,460,000	0.50%	12,300
PT. KATINGAN INDAH UTAMA	Lancar	2,850,000	0.50%	14,250
PT. ANTANG GANDA UTAMA	Lancar	780,000	0.50%	3,900
PT. BORNEO INDOBARA	Lancar	1,410,000	0.50%	7,050
PT. ARUTMIN INDONESIA NPLCT	Lancar	13,320,000	0.50%	66,600
PT. PARIPURNA SWAKARSA	Lancar	820,000	0.50%	4,100
PT. LANGGENG MUARA MAKMUR	Lancar	1,230,000	0.50%	6,150
PT. INDOTRUBA TENGAH	Lancar	410,000	0.50%	2,050
PT. INDOTRUBA TENGAH	Lancar	3,280,000	0.50%	16,400
PT. LANGGENG MUARA MAKMUR	Lancar	410,000	0.50%	2,050
PT. SAJANG HEULANG	Lancar	335,000	0.50%	1,675
<b>Jumlah</b>				<b>9,518,475</b>

### C.1.7. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bag Lancar TGR Rpo,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rpo,00. dan Rpo,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR

yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Tidak terdapat Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).

Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih – Bag. Lancar  
TP/TGR Rp0,00

#### C.1.8. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp0,00.

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tidak terdapat Rincian estimasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).

Persediaan  
Rp91.915.060,00

#### C.1.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar **Rp91.915.060,00** dan **Rp30.518.230,00**.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji pada Tabel 18.

Tabel 18  
Rincian Persediaan

No	Jenis Persediaan	TA 2013	TA 2012
1	Barang Konsumsi	33,610,110	22,615,680
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	5,858,750	3,245,550
3	Suku Cadang	52,446,200	4,657,000
4	Bahan Baku	-	-
5	Persediaan Lainnya	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>91,915,060</b>	<b>30,518,230</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Nilai persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname fisik sesuai BA Opname Fisik Nomor : BA-02/BPKIMI/BRSBB/12/2013 tanggal 31 Desember 2013.

Aset Tetap  
Rp14.189.193.757,00

## C.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji sebesar **Rp14.189.193.757,00** dan **Rp23.850.543.325,00**. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru per 31 Desember 2013 dan 2012 disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19  
Rincian Aset Tetap

No.	Uraian	TA 2013	TA 2012
1	Tanah	9,401,474,700	9,401,474,700
2	Peralatan dan Mesin	13,720,810,091	11,435,806,525
3	Gedung dan Bangunan	3,105,896,970	2,906,497,100
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
5	Aset tetap Lainnya	131,718,500	106,765,000
6	Konstruksi Dlm Pengerjaan	0	0
<b>Nilai</b>		<b>26,359,900,261</b>	<b>23,850,543,325</b>
Akumulasi Penyusutan Aset tetap		12,170,706,504	
<b>Nilai Bersih</b>		<b>14,189,193,757</b>	<b>23,850,543,325</b>

### C.2.1. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar **Rp9.401.474.700,00**. atau tidak ada penambahan atas pengadaan tanah maupun penialai kembali nilai tanah pada TA 2013. Aset berupa Tanah tersebut terletak di Jl. Karet Indah, Jl. Ir. PM. Noor No.9 dan Jl. Panglima Batur Barat No.2 Banjarbaru.

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 20.

Tabel 20  
Rincian Saldo Tanah

No	KIB	Luas	Nilai
1	1	3.801 m2	570,150,000
2	2	446 m2	178,400,000
3	1	7.196 m2	8,652,924,700
<b>Jumlah</b>			<b>9,401,474,700</b>

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah **Rp13.720.810.091,00**. dan **Rp11.435.806.525,00**.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>Rp 11,435,806,525</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
Pembelian	Rp 969,571,020
Transfer Masuk	Rp 1,315,432,546
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp -
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>Rp 2,285,003,566</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp -
Penghapusan	Rp -
<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>Rp 13,720,810,091</b>
<b>Akumulasi Penyusutan sd. 31 Desember 2013</b>	<b>Rp 10,312,159,589</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2013</b>	<b>Rp 3,408,650,502</b>

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Transaksi Pembelian terdiri dari :

No	Nama Barang	Unit	Rupiah
1	Multigas Detector	1	Rp 332,310,000
2	Fog Visiometer	1	Rp 56,050,500
3	Lemari Besi/Metal	2	Rp 5,940,000
4	Kursi Besi/Metal	20	Rp 19,910,000
5	Meja Rapat	1	Rp 20,108,000
6	A.C. Split	4	Rp 27,486,250
7	Televisi	1	Rp 9,999,990
8	UPS	2	Rp 19,999,980
9	Facsimile	1	Rp 4,999,940
10	PH Meter Portable	3	Rp 47,751,000
11	Turbidimeter	1	Rp 26,015,000
12	DO Meter	1	Rp 43,455,500
13	COD Reaktor	1	Rp 25,575,000
14	Automatic CO Analyzer	1	Rp 21,653,500
15	Neraca Analitis	1	Rp 49,197,500
16	Compressor Breathing Aparatus	1	Rp 42,185,000
17	Gas Combustible Detector	1	Rp 166,100,000
18	Conductivity Meter Portable	1	Rp 15,895,000
19	P.C. Unit	1	Rp 9,999,990
20	Printer	4	Rp 9,999,880
21	Scanner	1	Rp 14,938,990
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp 969,571,020</b>

2. Transaksi Transfer Masuk terdiri dari :

No	Nama Barang	Unit	Rupiah
1	Mesin Absensi	1	Rp 9,053,846
2	Peralatan Hidrologi Lainnya	1	Rp 1,306,378,700
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp 1,315,432,546</b>

Rincian A set tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan  
Rp1.247.350.055,00

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah **Rp3.105.896.970,00.** dan **Rp2.906.497.100,00.**

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



Transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pekerjaan perencanaan rehab ruang Pelayanan Jasa Teknis dan Ruang Rapat senilai Rp13.889.920,00
- b) Pelaksanaan pekerjaan rehab ruang Pelayanan Jasa Teknis senilai Rp104.450.000,00 dan Ruang Rapat senilai Rp73.245.000,00
- c) Pekerjaan pengawasan rehab ruang Pelayanan Jasa Teknis dan Ruang Rapat senilai Rp7.814.950,00.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0,00*

#### **C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**.

Tidak terjadi mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>		
Pengembangan Nilai Aset	Rp	-
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>		
Koreksi Nilai	Rp	-
<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Akumulasi Penyusutan sd. 31 Desember 2013</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2013</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>

Tidak terjadi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Aset Tetap Lainnya  
Rp131.718.500,00

### C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah **Rp131.718.500,00**. dan **Rp106.765.000,00**.

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya pada tahun 2013 keseluruhannya berasal dari pengadaan sebesar Rp24.953.500,00 yakni pembelian koleksi buku perpustakaan.

<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>Rp</b>	<b>106,765,000</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>		
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Rp	24,953,500
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>Rp</b>	<b>24,953,500</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>		
Koreksi Nilai	Rp	-
<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Akumulasi Penyusutan sd. 31 Desember 2013</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2013</b>	<b>Rp</b>	<b>131,718,500</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Konstruksi dalam  
Pengerjaan  
Rp0,00

### C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00**. dan **Rp0,00**.

## C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp(12.170.706.504,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing (Rp12.170.706.504,00) dan Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 21, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Tabel 21  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 13,720,810,091	Rp 10,312,159,589	Rp 1,101,604,849,001
2	Gedung dan Bangunan	Rp 3,105,896,970	Rp 1,858,546,915	Rp 1,247,350,055
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -	Rp -	Rp -
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 131,718,500	Rp -	Rp 131,718,500
<b>Akumulasi Penyusutan</b>			<b>Rp 12,170,706,504</b>	

Tuntutan  
Perbendaharaan  
Rp0,00.

## C.3 Piutang Jangka Panjang

### C.3.1 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar **Rp0,00.** dan **Rp0,00.** Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tidak ada rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2013..

Penyisihan Piutang tak  
Tertagih - Tuntutan  
Perbendaharaan Rp0,00

### C.3.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00**. dan **Rp0,00**.

Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Tidak ada rincian untuk Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).

Aset Lainnya  
Rp0,00.

### C.4 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah **Rp0,00**. dan **Rp0,00**. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Tidak rincian Aset Lainnya sd. 31 Desember 2013.

Aset Tak Berwujud  
Rp0,00.

#### C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah **Rp0,00**. dan **Rp0,00**.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Tidak ada rincian Aset Tak Berwujud sd. per 31 Desember 2013

Aset Lain-Lain  
Rp0,00.

#### C.4.2. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah **Rp0,00.** dan **Rp0,00.**

Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Tidak ada rincian mutasi untuk Aset Lain-lain sd. 31 Desember 2013.

<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>Rp</b> -
<b>Mutasi tambah:</b>	
- reklasifikasi dari aset tetap	Rp -
<b>Mutasi kurang:</b>	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp -
- penghapusan BMN	Rp -
<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>Rp</b> -
Akumulasi Penyusutan	Rp -
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2013</b>	<b>Rp</b> -

Tidak ada transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain

Kewajiban Jangka  
Pendek Rp0,00

#### C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji sebesar **Rp0,00.** dan **Rp0,00**

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tidak ada rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru

Utang Kepada Pihak Ketiga  
Rp0,00

##### C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar **Rp0,00.** dan **Rp210.000,00.**

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Tidak ada rincian Utang Pihak Ketiga pada Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru sd. per tanggal pelaporan disajikan pada Tabel 29.

Uang Muka dari KPPN  
Rp0,00

#### C.5.2 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2013 dan 2012 masing- masing sebesar **Rp0,00.** dan **Rp0,00.**

Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Pendapatan Yang  
Ditangguhkan  
Rp0,00

#### C.5.3 Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing- masing sebesar **Rp0,00.** dan **Rp0,00.**

Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan Pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBP, pengembalian belanja, serta pungutan/potong pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2013

Tidak ada rincian untuk Pendapatan yang Ditangguhkan pada Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru.

#### C.5.4 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima  
Dimuka Rp0,00

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar **Rp0,00.** dan **Rp0,00.**

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

Tidak ada rincian Pendapatan Diterima di Muka dari Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru

## EKUITAS

### C.6 Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 tersaji pada Tabel 22.

Rincian Ekuitas Dana Lancar disajikan pada Tabel 22.

Tabel 22  
Rincian Ekuitas Dana Lancar

No	Aset Lancar	TA 2013	TA 2012
1	Cadangan Piutang	91,421,525	77,351,905
2	Cadangan Persediaan	91,915,060	30,518,230
3	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk. Pendek	-	(210,000)
4	Ekuitas Dana Lancar Lainnya	-	-
5	Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	-	-
6	Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>183,336,585</b>	<b>107,660,135</b>

Cadangan Piutang  
Rp91.421.525,00

#### C.6.1 Cadangan Piutang

Nilai Cadangan Piutang tersaji per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar **Rp91.421.525,00** dan **Rp77.351.905,00**.

Cadangan Piutang merupakan jumlah ekuitas dana lancar Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Cadangan  
Persediaan  
Rp91.915.060,00

#### C.6.2. Cadangan Persediaan

Nilai Cadangan Persediaan tersaji per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar **Rp91.915.060,00** dan **Rp30.518.230,00**.

Cadangan Persediaan merupakan jumlah ekuitas dana lancar Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru dan dalam bentuk persediaan.

Dana yg Harus  
Disediakan utk Pemb  
Utang Jk Pendek

Rp0,00

### C.6.3 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka

#### Pendek

Nilai Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran

Utang Jangka Pendek disajikan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar

**Rp0,00.** dan **Rp(210.000,00).**

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

*Ekuitas Dana Lancar Lainnya Rp0,00.*

### C.6.4 Ekuitas Dana Lancar Lainnya

Nilai Dana Lancar Lainnya disajikan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar **Rp0,00.** dan **Rp0,00.**

Ekuitas Dana Lancar Lainnya merupakan ekuitas dana lancar berupa kas lainnya dan setara kas yang dikuasai oleh Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru.

*Belanja/Jasa yang Masih Harus Diterima Rp0,00*

### C.6.5 Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima

Nilai Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar **Rp0,00.** dan **Rp0,00.**

Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang akan diterima dari pihak lain.

*Belanja/Jasa yang Masih Harus Diserahkan negatif Rp0,00*

### C.6.6 Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan

Nilai Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar **Rp0,00.** dan **Rp0,00.**

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang harus diserahkan kepada pihak lain.

## C.7 Ekuitas Dana Investasi

### C.7.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

*Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Rp14.189.193.757,00*

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Tetap tersaji per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar **Rp14.189.193.757,00.** dan **Rp23.850.543.325,00.**

Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

*Diinvestasikan Dalam  
Aset Lainnya Rp0,00*

### **C.7.2 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya**

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Lainnya disajikan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00**. dan **Rp0,00**.

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya.

## **D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**

### **D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

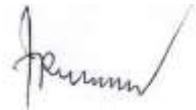
Tidak terdapat kejadian penting lainnya setelah tanggal neraca.

### **D.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Tidak ada pengungkapan penting lainnya.

Banjarbaru, 24 Januari 2014

Kuasa Pengguna Anggaran,



**FATMIR EDWAR**

NIP 19650601 199203 1 003

**Lampiran A1**

**Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta I**  
**Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap**  
**Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2013**

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
<b>A</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>		<b>659,560,799,089</b>	<b>93,244,208</b>	<b>659,467,554,881</b>
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	123,000,000,000	17,388,901	122,982,611,099
2	Alat Kantor	5	250,000,000,000	35,343,295	249,964,656,705
3	Alat Rumah Tangga	5	2,060,799,089	291,342	2,060,507,747
4	Alat Komunikasi	5	137,000,000,000	19,368,126	136,980,631,874
5	Komputer Unit	4	101,000,000,000	14,278,691	100,985,721,309
6	Peralatan Komputer	4	39,000,000,000	5,513,554	38,994,486,446
7	Peralatan Olah Raga	3	7,500,000,000	1,060,300	7,498,939,701
<b>B</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>		<b>767,779,514,418</b>	<b>911,180,576</b>	<b>766,868,333,842</b>
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	720,556,345,230	855,137,358	719,701,207,872
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	47,223,169,188	56,043,218	47,167,125,970
<b>C</b>	<b>Jaringan</b>		<b>118,248,037,347</b>	<b>98,105,223</b>	<b>118,149,932,124</b>
1	Jaringan Listrik	40	14,482,067,122	12,015,137	14,470,051,985
2	Jarungan Telepon	20	103,765,970,225	86,090,086	103,679,880,139
<b>D</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>		<b>35,179,748,118</b>	<b>762,623,394</b>	<b>34,417,124,724</b>
1	Barang Bercorak Kesenian	4	35,179,748,118	762,623,394	34,417,124,724
<b>E</b>	<b>Aset Tetap yang Tidak Digunakan</b>		<b>289,852,724</b>	<b>176,316,725</b>	<b>113,535,999</b>
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	157,500,000	95,806,877	61,693,123
2	Alat Kantor	5	23,975,430	14,584,197	9,391,233
3	Alat Rumah Tangga	5	37,655,300	22,905,630	14,749,670
4	Komputer Unit	4	52,300,450	31,814,240	20,486,210
5	Peralatan Komputer	4	18,421,544	11,205,782	7,215,762
<b>Jumlah Akm Penyusutan Aset Tetap</b>			<b>1,580,768,098,972</b>	<b>1,865,153,401</b>	<b>1,578,902,945,571</b>
<b>Jumlah Akm Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya</b>			<b>1,581,057,951,696</b>	<b>2,041,470,126</b>	<b>1,579,016,481,570</b>



